

NasDem Klarifikasi Video Surya Paloh yang Disebut Minta Anies Angkat Kursi

JAKARTA (IM) - Video yang menunjukkan Anies Baswedan bertemu dengan Ketua NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, ramai diperbincangkan oleh netizen di media sosial. Narasi dari video itu yakni Surya Paloh menunjukkan gestur meminta Anies mengangkat kursi. Partai NasDem akhirnya buka suara atas video tersebut.

Dalam video tersebut, tampak Surya Paloh dan Anies Baswedan berada di satu ruangan. Kemudian, Surya Paloh lantas mengajak Anies untuk berbincang.

Lalu, terlihat Surya Paloh menunjuk salah satu kursi kosong yang ada di ruangan tersebut. Anies lantas bergerak dan kemudian ada 2 orang lain yang membantu Anies Baswedan.

Kursi itu lantas didekatkan ke arah Surya Paloh. Kemudian, tampak Surya Paloh dan Anies Baswedan duduk berdampingan.

Bendem Partai NasDem Ahmad Sahroni lantas buka suara terkait video itu. Dia menyampaikan Surya Paloh memang sering meminta tolong kepada jajarannya.

Dia menyebut dalam video itu, Surya Paloh memang meminta tolong agar salah satu kursi yang kosong untuk digeser mendekati ke arahnya.

"Aduh kita aja pernah disuruh-suruh sama Bapak (Surya Paloh) kok, kalau hal angkat kursi mah kan gampang, kalau nggak ada kursi tolong geser kursinya ke sini," kata Sahroni saat dikonfirmasi, Senin (29/4).

Sahroni memastikan gestur Surya Paloh itu lumrah terjadi. Dia menyebut tidak ada maksud apapun di balik gestur itu.

"Jadi hal angkat kursi mah biasa aja, iya itu hal normal kok pada saat duduk misalnya kursi kurang kan bisa tarik kursi," ucap dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga menyebut Surya Paloh dan Anies Baswedan punya hubungan yang masih sangat baik sampai saat ini. Menurutnya, Surya Paloh menganggap Anies seperti adiknya sendiri.

"Sangat dan super baik. Bang Surya menganggap Anies kan sebagai adik, jadi nggak ada gap apapun sampai hari ini dan ke depan," ujarnya. ● me

MA Telah Kirim Putusan Kasasi Eltinus Omaleng untuk Dieksekusi KPK

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) telah mengirimkan petikan putusan kasasi perkara Bupati Mimika, Papua Tengah, Eltinus Omaleng, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, Eltinus Omaleng merupakan terdakwa kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, di Kabupaten Mimika.

"Info dari Panitera Muda Pidana Khusus petikan (putusan) sudah dikirim pagi ini," kata Juru Bicara MA, Suharto, kepada wartawan, Senin (29/4).

Adapun lembaga peradilan tertinggi itu mengabulkan kasasi nomor 523 K/Pid.Sus/2024 yang dilayangkan KPK dalam sidang yang digelar Rabu, 24 April 2024. Putusan ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Surya Jaya bersama Hakim Agung Ansori dan Hakim Agung Ainal Mar-

dhiyah sebagai anggota.

Majelis Hakim menilai, Eltinus Omaleng terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, putusan kasasi ini mengubah putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks yang sempat melepaskan Eltinus Omaleng dari segala tuntutan.

Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Bupati Mimika tersebut. Tidak hanya itu, Eltinus Omaleng juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidi- air dua bulan penjara.

Setelah putusan ini, MA menyerahkan tindak lanjut kepada Jaksa KPK untuk melakukan eksekusi. ● han

Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Subkontraktor Fiktif PT Amarta Karya

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi di perusahaan negara, PT Amarta Karya (Persero). Kedua tersangka diduga merugikan negara melalui pengadaan subkontraktor fiktif.

"Betul kami mengonfirmasi sudah cek ya, bahwa ada penetapan tersangka baru," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (29/4).

Meski demikian, Ali tidak mau mengungkap identitas dua tersangka baru tersebut. Ia hanya mengatakan nama mereka akan diumumkan ketika KPK melakukan penahanan. Saat ini, penyidikan perkara dugaan korupsi di perusa-

haan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu masih berlangsung.

"Nanti kami akan umumkan siapa saja mereka setelah memastikan proses penyidikan ini telah selesai," ujar Ali.

KPK sebelumnya sudah menjerat mantan Direktur Utama PT Amarta Karya Catur Wibowo dan bawahannya, Trisna Sutrisna selaku Direktur Keuangan perusahaan tersebut. Perbuatan mereka disebut merugikan keuangan negara hingga Rp46 miliar.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Menghukum Catur 9 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsidi 8 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp30,1 miliar. ● me

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



SIDANG PERDANA PERKARA PHPU PILEG 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4). MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

PPP Klaim 3.000 Lebih Suara Mereka Pindah ke Gerindra dan PAN di Jatim

PPP sangat yakin bahwa mereka berhak atas satu kursi di DPR RI dari dapil Jawa Timur. Namun suara mereka diduga dipindahkan ke partai lain.

JAKARTA (IM) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim bahwa perolehan suara untuk partainya berpindah saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di Jawa Timur pada Pileg DPR RI 2024.

Menurut permohonan PPP yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK), perpindahan suara itu terjadi di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV. Lebih dari 3.000 suara berpindah ke Partai

Gerindra dan PAN. Rinciannya, perolehan suara PPP menurut KPU RI sebanyak 110.633.

Sementara itu, menurut mereka, perolehan suara PPP mestinya 114.426 suara atau 3.793 suara. Sementara itu, perolehan suara Gerindra dianggap harusnya 339.283 suara atau 3.005 suara lebih sedikit dibandingkan 342.288 suara yang ditetapkan KPU RI, sedangkan PAN 112.366 suara atau 149 suara lebih sedikit dibandingkan 112.515 suara

yang ditetapkan KPU RI.

PPP menganggap, semestinya mereka berhak atas satu kursi DPR RI dari dapil ini. Dengan kejadian itu, dalam petitum permohonan sengketa PPP, mereka meminta agar MK memerintahkan KPU RI menggelar pemungutan suara ulang di Kecamatan Sumberbaru dan kecamatan lainnya di Kabupaten Jember.

"(Meminta MK) memerintahkan Termohon (KPU RI) untuk kursi terakhir DPR RI dari 8 (kursi tersedia) di dapil Jawa Timur IV kepada Pemohon atas nama Lucita Izza Rafika, caleg nomor urut 2," tulis permohonan dalam gugatan mereka.

Sebagai informasi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi tergesur

dari Senayan dengan hanya mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 dapil. Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 yang mencapai 151.796.631 suara, maka PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

Selain PPP, beberapa partai politik lain juga gagal mendapatkan kursi di Senayan lantaran gagal melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold 4 persen, yakni PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

MK menyatakan ada 297 gugatan sengketa Pileg 2024 yang diregistrasi menjadi perkara untuk disidangkan dan diadili dalam 30 hari kerja. Jumlah itu terbagi ke dalam sengketa Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Oleh sebab banyaknya jumlah perkara yang masuk, sembilan hakim konstitusi akan dibagi ke dalam 3 panel, sehingga masing-masing perkara sengketa bakal diadili panel yang berjumlah 3 hakim.

Arslul Tak Ikut Memutus

Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan hakim konstitusi Arslul Sanji ikut menyidangkan sengketa Perselelisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pileg untuk Partai Persatuan Pamban-

gunan (PPP). Namun, Arslul tidak diperkenankan ikut memutus sengketa yang diajukan oleh partai ber lambang Ka'bah tersebut.

"Karena ini ada permohonan dari PPP dan ada juga mungkin pihak terkait dari PPP. Diberitahkannya bahwa posisi Pak Arslul itu akan tetap mengikuti persidangan tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus," Ketua Panel II Saldi Isra di Gedung MK, Senin (29/4).

"Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini dan semua yang bersentuhan dengan PPP, apakah itu pemohon maupun pihak terkait beliau tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti," ujar Saldi.

Senada dengan itu juga dikatakan Juru Bicara MK, Fajar Laksono bahwa hakim Arslul tidak diperkenankan memutus putusan sengketa pileg PPP merupakan sebuah perkembangan yang akan terjadi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Jadi itu perkembangan di RPH. Jadi yang panel ini kan pemeriksaan dan pembuktian. Jadi nanti pengambilan keputusan itu ke pleno hakim, jadi semua panel akan melaporkan kepada pleno dalam hal pengambilan keputusan," tutur Fajar. ● han

Hakim MK Anwar Usman Diganti Saat Sidang Panel Sengketa Pileg PSI

JAKARTA (IM) - Sidang PHPU pileg di panel I sempat dihentikan saat hakim konstitusi Guntur Hamzah menggantikan Anwar Usman, di panel III karena pihak terkait dalam sidang di panel tersebut dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pergantian hakim konstitusi ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan Anwar Usman karena sebagai mana diketahui, Ketua Umum PSI merupakan keponakan-

nya yakni Kaesang Pangarep.

"Jadi tadi pagi misalnya, ternyata ada pihak terkait PSI di panel pak Anwar usman, secara beliau tidak boleh, maka digantikan oleh hakim konstitusi yang lain, begitu selesai Anwar Usman masuk, hakim konstitusi yang lain yang menggantikan kembali

ke panelnya, akan seperti itu terus," kata Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Senin (29/4).

Pergantian hakim tersebut dilakukan saat persidangan awal pada pukul 08.00 WIB pagi. Hakim konstitusi Guntur Hamzah menggantikan Anwar Usman untuk sementara di ruang sidang panel III, yang dipimpin oleh hakim Arief Hidayat.

Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan digelar pada 29 April-3 Mei 2024. Sidang digelar secara paralel di tiga Ruang Sidang MK, Gedung I dan II.

Pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh tiga Panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi. Panel I terdiri atas Suharto (Ketua Panel),

Daniel Yusmic Foeck, dan Guntur Hamzah, Panel II terdiri atas Saldi Isra (Ketua Panel), Ridwan Mansyur, dan Arslul Sanji.

Panel III terdiri atas Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbainingsih. Untuk pembagian penanganan jumlah perkara, Panel I memeriksa 103 perkara, Panel II dan Panel III masing-masing memeriksa 97 perkara.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, MK diberikan waktu untuk menyelesaikan perkara PHPU Legislatif paling lama 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam e-BRPK. Lebih lanjut, berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2024, MK akan memutus perkara dimaksud paling lama pada 10 Juni 2024. ● han

KPK Sita Uang Rp48,5 M dari Kasus Suap Bupati Labuhan Batu Nonaktif

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang puluhan miliar dari kasus suap yang melibatkan Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga alias EAR. Uang tersebut disita dari rekening milik orang kepercayaan EAR.

"Melengkapi berkas penyidikan dugaan penerimaan suap yang dilakukan Tersangka EAR (Bupati Labuhan Batu) dkk, Tim Penyidik kembali melakukan penyitaan berupa uang tunai dan uang yang tersimpan dalam rekening bank dengan jumlah Rp48,5 Miliar yang berasal dari para pihak yang menjadi orang kepercayaan Tersangka EAR," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/4).

"Uang tersebut tersebar dalam berbagai rekening bank dan satu diantaranya atas nama Tersangka EAR," kata Ali menambahkan.

KPK dalam melakukan pemblokiran sekaligus penyitaan akun rekening bank tersebut dengan berkoordinasi pada pihak bank terkait.

"Diharapkan sitaan yang ini nantinya diputus Majelis Hakim Pengadilan Tipikor agar dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, resmi menetapkan Bupati

Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR) sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Labuhanbatu, Kamis 11 Januari 2024.

Usai terjaring operasi senyap KPK, Erik Adtrada beserta sejumlah pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat 12 Januari 2024 pagi.

Setibanya di Kantor KPK, mereka pun dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, terlihat empat orang turun dari ruangan pemeriksaan dengan mengenakan rompi khas tahanan KPK.

"Laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi ke KPK ditindaklanjuti dengan verifikasi dan pengumpulan bahan keterangan, sehingga naik ke tahap penyelidikan serta dengan kecukupan alat bukti, berlanjut pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka EAR (Erik Adtrada Ritonga) Bupati Labuhanbatu," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat konferensi pers di kantornya, Jumat 12 Januari 2024. ● han



DIRJEN BEA CUKAI KUNJUNGI PERGUDANGAN DHL

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani (kanan) didampingi Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Gatot S Wibowo (kedua kiri) dan Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad (kiri) melihat langsung barang impor dalam pengawasan Bea Cukai di DHL Express Distribution Center-JDC di Tangerang, Banten, Senin (29/4). Kunjungan tersebut merupakan respons Bea Cukai atas beberapa kasus viral mengenai bea masuk yang harus dibayar dari sebuah barang kiriman dari luar negeri.

PENGUMUMAN

Bahwa PT SINAR INDO LINE, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut **PERSEROAN**), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan bahwa:

PT SINAR INDO LINE tersebut akan melakukan pelepasan sebagian saham dalam perseroan (akuisisi) kepada pihak ketiga.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitannya dengan Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

PT SINAR INDO LINE

GHJ Suite Lt 5, Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 30 April 2024

Direksi,
ttd